

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengembangan nuklir selalu menjadi kontroversial dalam sistem internasional. Walaupun nuklir bisa dikembangkan untuk hal yang positif, nuklir memiliki stigma negatif karena selalu dianggap sebagai sesuatu yang memabahayaakan. Proliferasi nuklir yang dimaksud adalah pengembangan nuklir sebagai senjata. Senjata nuklir merupakan sebuah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di seluruh negara. Oleh karena itu, rezim internasional membuat norma dan hukum untuk pembatasan pengembangan nuklir yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Amerika Serikat adalah negara *super power* yang ikut andil lebih banyak terkait penerapan pembatasan nuklir di lingkungan internasional. Amerika Serikat memiliki catatan sejarah sebagai negara yang sangat memperhatikan pembatasan proliferasi nuklir. Berkaitan dengan penelitian ini, Amerika Serikat memberikan tindakan tegas terhadap Korea Utara yang melakukan pengembangan program nuklir. Hal itu dikarenakan, pengembangan program nuklir di Korea Utara menerapkan pengembangan nuklir sebagai senjata nuklir. Hal ini menjadi kekhawatiran Amerika Serikat karena hal tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan internasional.

Dalam kasus ini, kepentingan nasional kedua negara yakni Amerika Serikat dan Korea Utara sangat berperan penting. Kepentingan nasional menjadi alasan kedua negara yang memiliki respon yang berbeda terkait pengembangan nuklir. Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki peranan penting sebagai pemimpin global dan memiliki tanggung jawab dalam stabilitas keamanan internasional. Selain itu, apabila stabilitas keamanan internasional terganggu akibat nuklir, konsekuensi logisnya adalah kepentingan nasional Amerika Serikat dalam segala bidang juga akan terdampak. Oleh karena itu, untuk manajemen risiko buruk terjadi Amerika Serikat melakukan pencegahan melalui kebijakan luar

negerinya sebagai intervensi internasional. Di sisi lain, Korea Utara mengembangkan program nuklir sebagai kepentingan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negaranya. Selain itu, Korea Utara melakukan uji coba nuklir, sebagai upaya untuk menarik perhatian lingkungan internasional. Korea Utara juga menjadi nuklir sebagai alat untuk diplomasi dan *deterrence* untuk menunjukkan eksistensi Korea Utara. Kepentingan nasional menjadi faktor utama kedua negara dalam meresponnya.

Berdasarkan catatan sejarah, Amerika Serikat sudah berulang kali memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Hal tersebut dilakukan karena Korea Utara tidak patuh pada perjanjian internasional di mana, negara tidak boleh menggunakan nuklir sebagai senjata. Walaupun Korea Utara terus mendapatkan sanksi ekonomi, Korea Utara tetap mengembangkan program nuklirnya. Sanksi yang diberikan hanya memberikan efek jera sesaat. Hal ini menimbulkan konflik dan perselisihan yang terus terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat masih memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Sanksi ekonomi yang diberikan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat yakni penghentian program nuklir Korea Utara. Pemberian sanksi ekonomi menjadi tidak efektif karena hasilnya selalu nihil dan hanya memiliki pengaruh yang kecil. Oleh karena itu, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump melakukan strategi denuklirisasi Korea Utara.

Denuklirisasi Korea Utara memiliki proses yang cukup panjang hingga sekarang. Oleh karena nuklir Korea Utara yang selalu menjadi ancaman, Donald Trump melakukan diplomasi dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dengan mengadakan beberapa pertemuan. Terhitung ada tiga KTT yang sudah dilakukan kedua pemimpin negara tersebut. Pertama di Singapura pada 12 Juni 2018, kedua di Hanoi pada tanggal 28 Februari 2019 dan terakhir di Demilitarization Zone (DMZ) pada 30 Juni 2019. Pertemuan bilateral yang dilakukan ini bertujuan agar terwujudnya denuklirisasi. Walaupun sudah terjadi beberapa pertemuan, denuklirisasi Korea Utara masih belum berjalan karena tidak adanya keputusan untuk menentukan kesepakatan bersama

Donald Trump juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespons konflik nuklir Korea Utara. Dengan menerapkan *strategic accountability*, serta *maximum pressure and engagement*. Terdapat 4 poin di dalamnya; pertama, menekan Beijing agar ikut aktif pada Korea Utara. Kedua, memperketat sanksi keuangan dan ekonomi pada Korea Utara. Ketiga, bersikap keras saat *bargaining position* agar Korea Utara mau melakukan denuklirisasi secara keseluruhan dan untuk syarat memulai negosiasi kembali. Keempat, pembangunan postur ancaman militer, seperti artikulasi ancaman eksplisit dalam melawan Pyongyang.

Selain kebijakan luar negeri Amerika Serikat merespon nuklir Korea Utara, Donald Trump juga meningkatkan pertahanan negara untuk menghadapi risiko terburuk apabila terdapat penggunaan militer dalam proses denuklirisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan anggaran pertahanan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan kepentingan nasional AS dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Peningkatan anggaran sangat berpengaruh atau memiliki efektivitas yang cukup berdampak. Hal itu tunjukkan pada tujuan peningkatan anggaran pertahanan itu sendiri yakni untuk tujuan peningkatan dan penguatan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan peningkatan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional, Amerika Serikat mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman masa depan salah satunya adalah konflik atau perang nuklir. Peningkatan anggaran adalah langkah preventif yang ditempuh oleh Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya perang nuklir. Dengan peningkatan anggaran pertahanan, akan memberikan *deterrence* kepada negara lain, karena secara tidak langsung, kekuatan pertahanan Amerika Serikat akan semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan kekuatan pertahanan dapat meminimalisasi untuk terjadinya konflik atau perang nuklir dengan Korea Utara.

Donald Trump juga membangun kepercayaan dari antagonis menjadi hubungan politik kooperatif, sebagaimana kebijakan luar negeri Trump dimana harus bisa menempatkan diri dalam situasi atau konflik apapun. Oleh karena itu, Amerika Serikat membangun hubungan kerjasama dengan Korea Utara. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik dan bahkan perang nuklir. Selain itu ada

tujuan yang penting yakni untuk mendukung dan melancarkan program strategi denuklirisasi Korea Utara. Upaya yang dilakukan ini memiliki pengaruh yang kecil karena kebijakan perubahan arah politik antagonis menjadi kooperatif dengan Korea Utara berjalan tidak lancar. Hal itu dikarenakan kebijakan ini sejalan dengan negosiasi antara kedua negara dalam usaha mewujudkan denuklirisasi Korea Utara. Dalam beberapa pertemuan antar kedua kepala negara, di sana tidak memunculkan banyak hasil yang signifikan, tidak menemukan kesepakatan bersama dari beberapa tawaran kesepakatan yang ditawarkan dan perundingan yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar.

Selain itu, melakukan aliansi AS dengan Korea Selatan, juga merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Trump yang disebut *America First* dan juga adanya efek deterrence karena pendirian sistem rudal (THAAD) di Korea Selatan. Dengan adanya THAAD diharapkan sebagai sebuah gertakan bagi negara Korea Utara agar tidak semena-mena melakukan uji coba nuklir. Donald Trump juga melibatkan China untuk mendesak denuklirisasi, karena China merupakan satu-satunya sekutu dekat dengan Korea Utara. Hal ini juga memberikan efek *deterrence* bagi Korea Utara dikarenakan AS bisa saja sewaktu-waktu menggaet sekutu Korea Utara ini agar berpihak pada AS. Lalu yang terakhir dibidang militer, Amerika Serikat juga mempersiapkan Armada Kelima Amerika Serikat, US PACOM. Ancaman bisa datang kapan saja, sehingga persiapan sangat perlu dilakukan oleh Amerika Serikat untukantisipasi risiko terburuk akibat gagalnya denuklirisasi. Dengan mensiapiagakan pangkalan militer ini, bertujuan agar *power maximizer* dari AS terwujud karena bagian tindakan dari realisme *offensive*. Dan tentu saja memberikan efek getaran bagi musuhnya.

6.2 Saran

Dalam mengatasi konflik nuklir Korea Utara memanglah tidak mudah. Kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan Trump juga belum membuahkan hasil yang pasti untuk denuklirisasi. Maka dari itu, berikut saran-saran menurut penulis.

Pertama, Korea Utara merupakan negara nuklir. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sebagai kekuatan terutama dalam hal senjata. Di bawah opsi ini, Korea Utara akan menerima apa yang dituntutnya selama beberapa tahun. Hal ini dapat membuka saluran untuk pembicaraan langsung, kemungkinan perjanjian damai dan normalisasi hubungan. Namun dari aspek negatif, hal itu dapat memberi Korea Utara kepuasan dan mengarah pada kebijakan yang lebih tegas terutama kepada Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, rekognisi akan merusak upaya dan rezim non-proliferasi yang ada. Dalam perjanjian internasional tentang nuklir atau dikenal dengan NPT, negara dilarang untuk menggunakan nuklir sebagai senjata. Akan tetapi, Korea Utara menjadikan nuklir sebagai kekuatan untuk menjalankan negara sekaligus sebagai alat untuk melawan negara dengan kekuatan besar. Oleh karena itu, PBB sebagai pengatur hukum dan perjanjian internasional sebaiknya mempertegas dan memperkuat aturan terkait penggunaan nuklir agar bisa menciptakan suasana lingkungan internasional yang kondusif.

Kedua, penerapan lebih banyak sanksi dan tekanan untuk meninggalkan program nuklir. Saat ini sulit untuk mengatakan ke mana rezim sanksi dapat diberikan dan bidang apa yang dapat dikenakan sanksi. Namun, jika Korea Utara terus melakukan provokasi, AS akan mendapat dukungan dari PBB. Meskipun rezim sanksi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan dan Korea Utara masih tetap mengembangkan program nuklirnya. Meskipun demikian, Korea Utara yang sudah sering diberikan sanksi akibat penggunaan nuklir sebagai senjata, selalu melakukan kembali atau terus menjalankan program senjata nuklir. Apabila dengan sanksi tidak bisa menyelesaikan masalah ini, PBB atau negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, bisa melakukan pendekatan lain yang bisa lebih efektif seperti melakukan hubungan bilateral dan kerjasama lainnya dengan Korea Utara untuk memunculkan keterbukaan dari negara tersebut.

Ketiga, solusi militer. Dalam opsi ini ada beberapa varian aksi militer yang dapat dipilih oleh pemerintahan Trump. Pertama adalah kemungkinan serangan udara diarahkan ke pangkalan-pangkalan rudal, seperti yang telah disarankan beberapa kali. Yang lainnya adalah intervensi militer yang mengerahkan tidak

hanya angkatan udara tetapi juga marinir dengan tujuan untuk menggulingkan rezim. Hal ini adalah spekulasi sementara apabila kondisi lingkungan internasional semakin tidak kondusif akibat penggunaan nuklir sebagai senjata yang dijalankan oleh Korea Utara.

Keempat, diplomasi. Mengusulkan pembicaraan multilateral Korea Utara dan juga bilateral yang tidak dikondisikan oleh negara bagian program nuklir. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi damai dalam lingkungan internasional. Hal utama yang harus dilakukan adalah diplomasi dan pendekatan kawasan. Seperti yang diketahui kawasan Asia Timur adalah kawasan yang negara-negaranya berdiri mandiri tanpa adanya organisasi kawasan. Oleh karena itu, pihak ketiga seperti organisasi internasional seperti PBB bisa melakukan langkah diplomasi melalui kerjasama dengan negara-negara Asia Timur lainnya seperti Cina, Korea Selatan dan Jepang. Dalam kasus ini, pendekatan dan keterlibatan semua pihak sangat diharapkan demi menciptakan perdamaian dunia.

Kelima, perselisihan Amerika Serikat dan Korea Utara tentang Nuklir sudah berlangsung sangat lama. Dalam bidang keilmuan, kasus ini telah menjadi pembahasan yang cukup menarik dalam studi keamanan internasional. Penerapan terori dan konsep dalam pembahasan tentang perselisihan Amerika Serikat dan Korea Utara cenderung konstan karena dihadapkan selalu dengan kasus yang sama dan cara penyelesaian yang sama serta selalu tidak menemukan hasil. Akan tetapi, sebagai saran teoritis, pembahasan tentang kasus ini, sebaiknya harus terus diteliti karena akan sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama sebagai landasan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan di masa depan.